

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya perhatian dari masyarakat, investor, dan pemerintah mendorong perusahaan untuk menerapkan transparansi yang lebih tinggi terkait pengelolaan pajak serta dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas usahanya. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan *tax planning* secara agresif, belum menerapkan *green accounting* secara optimal, serta belum mengungkapkan *carbon emission disclosure* secara lengkap dalam laporan keberlanjutan. Eksistensi fenomena tersebut mengonstruksi skeptisisme di artikulasi pasar, khususnya para penanam modal, diskursus konsistensi korporasi dalam mengimplementasikan tata kelola etis serta doktrin keberlanjutan, yang secara simultan beresiko mendegradasi valuasi entitas di pasar modal. Oleh sebab itu, komite audit diperlukan untuk memastikan bahwa tata kelola pajak, laporan lingkungan, dan transparansi emisi karbon perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Keterbatasan transparansi korporasi dalam dimensi finansial dan ekologis divalidasi oleh data empiris emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Guna memitigasi asimetri informasi tersebut, BEI meluncurkan sistem ESG Reporting pada awal tahun 2025 melalui integrasi formulir keterbukaan informasi untuk memacu akuntabilitas tata kelola lingkungan, sosial, dan korporasi yang sebelumnya dinilai belum optimal. Data dari (Pasardana.id, 2025). Rendahnya tingkat transparansi informasi emisi karbon pada emiten di Indonesia dipicu oleh ketiadaan regulasi yang mengikat, sehingga pelaporannya sejauh ini masih bersifat sukarela (Rafiudin & Munari, 2025). Kondisi ini memperkuat adanya ketidakkonsistenan transparansi perusahaan dalam pengelolaan pajak dan lingkungan, sehingga menimbulkan keraguan investor terhadap akuntabilitas perusahaan dan berdampak pada nilai perusahaan.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan transparansi dan akuntabilitas perusahaan adalah pada PT Bumi Resources Tbk (Christian

et al., 2024). Sebagai perusahaan di sektor pertambangan, perusahaan ini menghadapi berbagai isu terkait kompleksitas pengelolaan pajak, dampak lingkungan, serta pengungkapan emisi karbon. PT Bumi Resources Tbk menunjukkan bahwa nilai perusahaan mengalami fluktuasi yang tercermin dari kinerja keuangan dan pergerakan pasar. Hal ini terlihat dari kondisi laba dan pendapatan perusahaan yang tidak konsisten. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan perusahaan mengalami penurunan hingga 20,4% secara tahunan, dari US\$2,89 miliar menjadi US\$2,30 miliar, yang disebabkan oleh penurunan harga batu bara (Kontan.co.id, 2026). Karakteristik industri pertambangan dengan eksternalitas lingkungan yang masif mengharuskan implementasi *green accounting* serta transparansi emisi karbon secara komprehensif, meskipun realisasinya di lapangan sejauh ini masih tergolong minim. Selain itu, kompleksitas struktur perusahaan juga berpotensi memunculkan praktik *tax planning* yang kurang transparan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran komite audit dalam memastikan transparansi laporan keuangan dan keberlanjutan perusahaan guna menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan.

Kasus PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako menjadi potret nyata bagaimana sektor pertambangan dapat mengancam stabilitas lingkungan dan eksistensi korporasi. Sorotan tajam dari Walhi dan warga lokal muncul setelah wilayah pesisir Pulau Mori diduga terpapar limbah beracun dan Danau Mahalona mengalami pendangkalan akibat luapan sedimen sisa penambangan (Tasiabe, 2024). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab lingkungan melalui penerapan praktik keberlanjutan seperti *green accounting*, pengungkapan informasi lingkungan, serta program pembangunan berkelanjutan. Penerapan kebijakan keberlanjutan tersebut diproyeksikan mampu mengoptimalkan keterbukaan informasi, mendongkrak reputasi korporasi di pasar modal, serta mengeskalasi nilai perusahaan secara berkelanjutan. Guna mengawal agenda ini, komite audit bertindak sebagai pilar strategis dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui fungsi supervisi pelaporan keuangan, pemastian kepatuhan regulasi, serta penguatan akuntabilitas publik. Keberadaan komite audit diharapkan

mampu menekan praktik *tax planning* yang agresif, meningkatkan kualitas penerapan *green accounting*, serta mendorong pengungkapan *carbon emission disclosure* yang lebih transparan.

Eksplorasi empiris oleh Nugroho (2025) mengindikasikan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Realitas ini terjustifikasi oleh premis bahwa eksploitasi celah legalitas pajak secara agresif rentan mendistorsi kredibilitas manajemen, yang pada gilirannya menekan elastisitas permintaan investasi. Fenomena tersebut diperparah oleh asimetri informasi yang berkelanjutan di pasar modal. Bukti empiris dari Wardhani *et al.*, (2026) serta Lee (2022) mengonfirmasi adanya ketidakkonsistenan pengungkapan aspek lingkungan dan pajak oleh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena minimnya transparansi ini memicu skeptisisme investor terhadap akuntabilitas korporasi, keberadaan mekanisme pengawasan seperti komite audit menjadi instrumen krusial untuk memulihkan kepercayaan pasar dan memperkuat nilai perusahaan.

Bukti empiris terdahulu mengonfirmasi bahwa transparansi korporasi, yang direfleksikan melalui pelaporan akuntansi hijau dan pengungkapan emisi karbon, memiliki keterkaitan erat dengan penilaian pasar. Studi oleh Setianingsih *et al.*, (2025) pada industri pertambangan di Indonesia (2021–2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi emisi karbon berdampak positif signifikan terhadap nilai perusahaan, meskipun implementasi *green accounting* belum mampu memberikan stimulus yang signifikan. Kontras dengan hal tersebut, investigasi pada sektor manufaktur periode 2021–2023 oleh Trenggono dan Trisnarningsih (2025) membuktikan bahwa baik *green accounting* maupun transparansi emisi karbon secara simultan mampu memengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Darmawan dan Angelina (2021) *tax planning* merupakan sebuah pendekatan strategis yang diterapkan oleh wajib pajak perorangan maupun korporasi untuk meminimalkan beban fiskal mereka tanpa menyalahi regulasi hukum yang berlaku. *Tax Planning* bisa memperluas manfaat sehingga meningkat pula nilai perusahaannya. Penilaian terhadap performa nilai perusahaan dapat diidentifikasi melalui indikator harga pasar sahamnya.

Eksistensi nilai nominal saham yang terus menguat mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan yang dirasakan langsung secara multiplikatif oleh para penanam modal. Untuk mempertahankan atau meningkatkan harga saham, perusahaan perlu menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga mampu membagikan dividen dalam jumlah yang optimal. Kemampuan perusahaan dalam membayar dividen bergantung pada besarnya laba yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan sering menerapkan strategi *tax planning* sebagai upaya mengoptimalkan laba melalui pengelolaan kewajiban perpajakan secara legal, sehingga beban pajak dapat ditekan dan laba setelah pajak meningkat. (Tambahani *et al.*, 2021).

Aspek *green accounting* juga menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan dalam laporan keuangan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. *Green accounting* pada dasarnya bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui pengungkapan biaya dan kinerja lingkungan. Namun, dalam praktiknya, transparansi laporan keuangan yang berkaitan dengan aspek lingkungan masih sering belum optimal. Menurut Khan *et al.*, (2025) pengungkapan *green accounting* di negara berkembang menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kualitas dan ketidakkonsistenan informasi, sehingga mengurangi transparansi dan relevansi informasi bagi investor. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana *green accounting*, khususnya melalui transparansi laporan keuangan, memengaruhi nilai perusahaan.

Transparansi mengenai jejak karbon saat ini menempati posisi krusial karena merefleksikan komitmen ekologis korporasi, yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator penentu dalam mendongkrak valuasi pasar perusahaan. Tujuan utama dari *carbon emission disclosure* adalah mengoptimalkan akuntabilitas pelaporan terintegrasi melalui penyajian data mengenai volume emisi, taktik mitigasi, serta potensi ancaman ekologis yang dihadapi korporasi. Pada kenyataannya, publikasi data polusi oleh pelaku bisnis masih berada di level yang minim. Fluktuasi dan ketidakpastian data tersebut pada akhirnya merugikan investor yang membutuhkan transparansi tinggi. Menurut Fitri dan Putra (2025) Keterbukaan terhadap laporan emisi

karbon secara empiris merefleksikan penguatan harga saham entitas bisnis, sebuah fenomena yang dilandasi oleh minimalisasi kesenjangan informasi struktural sehingga bermuara pada pengokohan keyakinan investasi oleh para pemangku kepentingan (investor).

Nilai perusahaan merefleksikan penilaian pasar terhadap capaian finansial serta potensi pertumbuhan korporasi, yang umumnya ditentukan oleh kredibilitas dan keterbukaan informasi dalam pelaporan keuangan. Transparansi laporan keuangan menduduki posisi sentral dalam ekosistem korporasi karena mampu meminimalisasi asimetri informasi yang kerap memisahkan pihak internal dari pemangku kepentingan, di mana luaran akhirnya bermuara pada pengokohan keyakinan investasi di pasar makro. Merujuk pada pemikiran Miftahudin dan Sisdiyanto (2024) penyajian laporan keuangan yang bermutu tinggi merupakan instrumen krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan korporasi. Transparansi informasi ini secara langsung mengeskalasi tingkat kepercayaan para investor, kreditor, maupun para pemangku kepentingan eksternal, yang kelak berkontribusi positif terhadap apresiasi valuasi pasar korporasi.

Peran komite audit sebagai variabel moderasi menjadi instrumen vital dalam mengendalikan bagaimana kebijakan *tax planning*, akuntansi hijau, serta keterbukaan informasi jejak karbon memengaruhi valuasi korporasi. Melalui fungsi pengawasan yang ketat, komite ini bertindak sebagai benteng utama dalam menegakkan akuntabilitas dan kualitas sajian laporan keuangan (Syahputra *et al.*, 2025). Fungsinya adalah menjamin keterbukaan laporan keuangan agar asimetri informasi dapat dikurangi. Semakin kuat pengawasan komite ini, semakin kecil peluang manipulasi laporan keuangan, sehingga kredibilitas perusahaan di hadapan investor meningkat dan menaikkan nilai pasar perusahaan (Laksana & Handayani, 2022).

Kontribusi besar terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat instrumen dividen, royalti, dan sektor perpajakan menjadikan industri energi sebagai pilar finansial yang vital bagi kas negara (Ngongo, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada emiten-emiten sektor energi yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI)

selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Sektor ini memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan roda ekonomi nasional melalui pemenuhan pasokan daya untuk kebutuhan rumah tangga, jaringan logistik, serta aktivitas manufaktur. Sektor energi menjadi salah satu fokus utama dalam konteks ini mengingat besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap emisi karbon yang dipengaruhi oleh dominasi penggunaan energi fosil, khususnya batu bara, di Indonesia (Setyono & Kiono, 2021). Menyoroti upaya perusahaan dalam mengungkapkan dan mengelola dampak lingkungan mereka, sekaligus menunjukkan bagaimana pengungkapan tersebut mungkin mempengaruhi persepsi investor dan nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

Orisinalitas penelitian ini bertumpu pada pengintegrasian *tax planning*, *green accounting*, dan *carbon emission disclosure* dalam satu model kuantitatif terpadu untuk memengaruhi nilai perusahaan. Jauh berbeda dari tren riset terdahulu yang menguji faktor finansial dan ekologis secara parsial, studi ini hadir dengan menyatukan kedua variabel tersebut dalam satu model yang komprehensif. Pengisian *research gap* dilakukan dengan memosisikan komite audit sebagai elemen pengondisi (*moderating variable*). Melalui pendekatan ini, interaksi antara tata kelola pajak dan tanggung jawab ekosistem dapat dianalisis secara mendalam pada perusahaan energi di BEI. Fokus pada sektor energi didasarkan pada karakteristik unik industri ini yang menjadi kontributor besar perekonomian sekaligus menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Melalui pendekatan terintegrasi ini, penelitian ini menawarkan kebaruan yang masih sangat jarang dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Keterbukaan informasi terkait strategi manajemen perpajakan, tanggung jawab ekologis, serta transparansi pelaporan emisi karbon merupakan instrumen krusial bagi investor dalam merumuskan keputusan investasi. Di samping itu, fungsionalitas mekanisme tata kelola internal, seperti komite audit, diproyeksikan mampu mengoptimalkan kualitas supervisi laporan korporasi demi menumbuhkan kredibilitas di mata penanam modal. Atas dasar tersebut, studi ini diharapkan dapat menyumbangkan andil nyata bagi perusahaan untuk mengeskalasi transparansi, komitmen lingkungan, dan memperkuat implementasi tata kelola yang baik demi mendongkrak valuasi

entitas secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Tax Planning*, *Green Accounting*, dan *Carbon Emission Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Energi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan pada latar belakang, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam studi ini meliputi:

1. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor energi?
2. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor energi?
3. Apakah *carbon emission disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor energi?
4. Apakah peran komite audit dapat memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi?
5. Apakah peran komite audit dapat memoderasi pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi?
6. Apakah peran komite audit dapat memoderasi pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi?

C. Tujuan Penelitian

Menyesuaikan dengan poin-poin pertanyaan penelitian, target yang hendak dipenuhi dalam riset ini difokuskan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi.
4. Untuk menguji dan menganalisis peran komite audit dapat memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi.

5. Untuk menguji dan menganalisis peran komite audit dapat memoderasi pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi.
6. Untuk menguji dan menganalisis peran komite audit dapat memoderasi pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan pada sektor energi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Berkontribusi sebagai referensi ilmiah dalam memperluas cakupan teori akuntansi lingkungan dan keuangan, terutama terkait bagaimana keputusan manajerial fiskal serta keterbukaan informasi ekologis dapat mengonstruksi pertumbuhan nilai sebuah korporasi.
- b. Mengisi *research gap* penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan komite audit sebagai variabel moderasi.
- c. Memperkaya literatur penelitian mengenai hubungan antara strategi keuangan perusahaan dan tanggung jawab lingkungan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Menyajikan wawasan strategis bagi manajemen korporasi mengenai urgensi pengintegrasian akuntansi lingkungan (*green accounting*), transparansi laporan polusi (*carbon emission disclosure*), serta tata kelola perpajakan dalam upaya mendongkrak valuasi pasar perusahaan.
- b. Menyediakan landasan pertimbangan strategis untuk menilai prospek investasi, khususnya dalam mengevaluasi keseimbangan antara profitabilitas keuangan korporasi dan implementasi tanggung jawab sosial-lingkungan.
- c. Menjadi bahan rujukan bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan mutu tata kelola melalui penguatan fungsi komite audit.

3. Manfaat Kebijakan:

- a. Studi ini diarahkan sebagai pijakan referensial bagi regulator dalam memformulasikan kebijakan fiskal hijau dan instrumen keberlanjutan korporasi. Hal tersebut sejalan dengan manifestasi UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang menginisiasi reformasi perpajakan berbasis

instrumen pajak karbon, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mengartikulasikan pakem pengendalian emisi demi memitigasi gas rumah kaca nasional. Secara makro, dualitas regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengonvergensi kebijakan fiskal dan proteksi lingkungan ke dalam aktivitas operasional perusahaan.

- b. Eksplorasi ini diposisikan sebagai pijakan evaluatif bagi otoritas pasar modal (BEI dan OJK) dalam mengeskalisasi standardisasi transparansi finansial dan ekologis. Langkah penguatan ini telah memperoleh legitimasi yuridis lewat POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang secara imperatif mewajibkan emiten mengonstruksi serta mendistribusikan *sustainability report*. Secara fundamental, kodifikasi aturan tersebut diorientasikan untuk memacu keterbukaan, akuntabilitas, serta diseminasi data performa korporasi pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.
- c. Penelitian ini berfungsi menstimulasi akselerasi kesadaran korporasi dalam mengartikulasikan laporan emisi karbon dan operasional bisnis berbasis lingkungan. Eksistensi riset ini memperoleh *legitimacy yuridis* melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang telah direstrukturisasi ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Instrumen hukum tersebut secara imperatif mengikat akuntabilitas entitas bisnis terhadap proteksi ekosistem sekaligus mengkondisikan keterbukaan diseminasi informasi lingkungan kepada publik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Unit Analisis:

Dokumen laporan keuangan beserta laporan tahunan korporasi yang diunduh dari laman resmi www.idx.co.id digunakan sebagai basis data dalam studi ini. Objek pengamatan yang diuji dan dianalisis dibatasi pada perusahaan-perusahaan sub-sektor energi yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Kurun Waktu Penelitian:

Guna menjamin ketersediaan data yang mutakhir dan representatif dalam menggambarkan pergerakan korporasi, kurun waktu 2020–2024

dipilih sebagai batasan pengamatan dalam riset ini. Data sekunder berupa laporan keberlanjutan, laporan tahunan, serta laporan keuangan dari emiten industri energi diperoleh langsung via situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penyelidikan ini difokuskan untuk memetakan bagaimana fluktuasi nilai korporasi dipengaruhi oleh pengungkapan emisi gas rumah kaca, adopsi akuntansi lingkungan, dan tata kelola perpajakan.

3. Variabel Dependen:

Rasio *Price to Book Value* (PBV) diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai instrumen kuantitatif untuk mengukur nilai perusahaan selaku variabel dependen. Pengukuran tersebut esensial guna memotret ekspektasi para pelaku pasar modal terhadap prospek ekspansi serta kinerja korporasi. Menurut indikator ini, tinggi rendahnya apresiasi pasar sangat ditentukan oleh transparansi dan keabsahan sajian data keuangan yang dipublikasikan oleh manajemen.

4. Variabel Independen:

dalam penelitian ini mencakup tiga indikator utama, yaitu *Tax Planning* (X1), *Green Accounting* (X2), dan *Carbon Emission Disclosure* (X3). Operasionalisasi *tax planning* diukur melandaskan rasio *Tax Retention Rate* (TRR), sedangkan implementasi *green accounting* didekati melalui variabel kuantitatif berupa metode *Dummy*. Sementara itu, keluasan *carbon emission disclosure* dievaluasi menggunakan instrumen *Carbon Disclosure Index* (CDI) berdasarkan analisis isi (*content analysis*) atas item-item lingkungan yang dipublikasikan dalam laporan korporasi.

5. Variabel Moderasi:

Pengaruh dari perencanaan perpajakan, akuntansi berbasis keberlanjutan, dan disklosur jejak karbon terhadap nilai pasar korporasi diuji di bawah pengaruh tata kelola komite audit sebagai variabel moderasi. Ukuran untuk variabel pemoderasi ini ditentukan lewat kalkulasi jumlah anggota komite audit yang menduduki jabatan di perseroan. Hal tersebut bertumpu pada premis bahwa pengawasan atas integritas pelaporan keuangan akan berjalan lebih ketat seiring bertambahnya jumlah anggota tim pengawas tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, sistematika penulisan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi acuan dasar untuk penelitian, penelitian terdahulu, model konseptual penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, definisi konseptual dan operasional variabel, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil uji yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi penelitian yang bermanfaat bagi penelitian lanjutan.